



**SENSUS
EKONOMI
2026**



LAPORAN KINERJA 2025

Inspektorat Wilayah II



BADAN PUSAT STATISTIK

LAPORAN KINERJA

INSPEKTORAT WILAYAH II

TAHUN ANGGARAN 2025



BADAN PUSAT STATISTIK

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Badan Pusat Statistik Tahun 2025. Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas kinerja Inspektorat Wilayah II kepada publik dan pemangku kepentingan sekaligus sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai unit pengawasan intern di Lingkungan BPS, kinerja Inspektorat Wilayah II harus dapat berkontribusi dan berkolaborasi dengan unit kerja lain dalam mendukung pencapaian visi dan misi BPS yang dijabarkan dalam Rencana Strategis tahun 2025-2029. Kontribusi yang dapat diberikan dari hasil pelaksanaan kegiatan di Inspektorat Wilayah II diantaranya meningkatkan kualitas laporan keuangan, meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan meningkatkan penilaian Reformasi Birokrasi (RB).

Kami berharap Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II dapat memberikan gambaran mengenai kinerja Inspektorat Wilayah II selama tahun 2025 secara terperinci dan transparan sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II. Selain itu, semoga laporan kinerja ini dapat berguna untuk evaluasi dan demi peningkatan kinerja Inspektorat Wilayah II pada khususnya.

Jakarta, 19 Januari 2026

Plt. Inspektur Wilayah II



Engeng Lisnawati

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran.....	4
1.4 Potensi Permasalahan	7
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
2.1 Visi dan Misi Inspektorat Wilayah II.....	10
2.2 Target Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025-2029	13
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2025.....	14
2.4 Dukungan terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang Menjadi Tanggung Jawab BPS Tahun 2025.....	15
2.5 Rencana Kerja Anggaran Tahun 2025.....	19
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Inspektorat Wilayah II Tahun 2025.....	21
3.2 Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II terhadap Target Renstra	34

3.3 Capaian Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025	35
3.4 Prestasi dan Inovasi.....	37
3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran Tahun 2025.....	38
BAB IV PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Rekomendasi Perbaikan.....	42
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025	vii
Tabel 1.1	Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II menurut Jabatan	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2025-2029.....	14
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	15
Tabel 2.3	Rincian Pagu Anggaran Tahun 2025	20
Tabel 3.1	Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025.....	24
Tabel 3.2	Target Indikator Kinerja Berdasarkan Bobot	25
Tabel 3.3	Lingkup Pengawasan Tim Inspektorat Wilayah II	26
Tabel 3.4	Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Realisasi Bobot.....	27
Tabel 3.5	Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK.....	28
Tabel 3.6	Realisasi Kinerja Nilai Pengawasan Asurans	29
Tabel 3.7	Realisasi Kinerja Nilai Pengawasan Konsultansi	31
Tabel 3.8	Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026	33
Tabel 3.9	Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra	34
Tabel 3.10	Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2025	38
Tabel 3.11	Nilai Efisiensi Anggaran	39
Tabel 3.12	Nilai Efisiensi Anggaran Perjalanan Pengawasan	40
Tabel 3.13	Rincian Kegiatan Pengawasan Hasil Efisiensi.....	40

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS.....	3
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II menurut Jenis Kelamin Tahun 2025.....	4
Gambar 1.3 Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025	5
Gambar 3.1 Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah II Periode 2023-2025	21
Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II dengan Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Utama	23

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pernyataan Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II	
Tahun 2025.....	45
Lampiran 2 Jumlah Pegawai menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025	47
Lampiran 3 Jumlah Pegawai menurut Golongan Kepangkatan	
Tahun 2025.....	48
Lampiran 4 Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025	49
Lampiran 5. Prestasi dan Inovasi Tahun 2025.....	50
Lampiran 6. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Tahun 2025	51
Lampiran 7. Rincian nilai kinerja pengawasan assurance Tahun 2025	52
Lampiran 8. Rincian nilai kinerja pengawasan konsultasi Tahun 2025	55

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas atas kinerja yang dilaksanakan dalam mencapai visi dan misi organisasi sebagaimana dijabarkan dalam tujuan dan sasaran strategis yang mengacu pada Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029 dan Reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Laporan ini juga mencerminkan pengelolaan anggaran yang optimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memberikan informasi kepada publik dan para pemangku kepentingan.

Capaian kinerja sasaran strategis Inspektorat Wilayah II, yakni "Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas" yang diukur menggunakan Indikator Kinerja Utama "Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara "mencapai 101,93 persen dengan indeks Penilaian Kinerja Organisasi pada kategori "Baik". Pencapaian ini didukung oleh pengelolaan anggaran dalam Program Dukungan Manajemen sebesar Rp607.159.000,- dengan tingkat penyerapan anggaran sebesar 99,04 persen. Berdasarkan data capaian kinerja dan realisasi anggaran tersebut, Inspektorat Wilayah II berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar 1,03 persen

Tabel 1 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %
(1)	(2)	(3)	(4)
Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58	72,96	101,93

Pada laporan ini juga mengungkapkan analisis capaian kinerja yang diperoleh melalui aktivitas pengawasan Inspektorat Wilayah II sesuai standar mutu, perbandingan antara target tahun berjalan dengan target Rencana Strategis termasuk kendala serta permasalahan yang ditemukan beserta solusi dan rencana perbaikan kinerja yang akan datang.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, tugas Inspektorat II (dalam laporan ini masih menggunakan nomenklatur Inspektorat Wilayah II) adalah melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Inspektorat Wilayah II memiliki tugas melakukan pengawasan intern yang dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja (PK) 2025 serta diselaraskan dengan Rencana Strategis 2025-2029.

Untuk meningkatkan kualitas hasil pengawasan, Inspektorat Wilayah II terus berupaya meningkatkan kompetensi auditornya serta memperluas cakupan kegiatan pengawasannya. Berdasarkan Keputusan Inspektur Utama Nomor 4 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Inspektur Utama Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tim Penanggung Jawab Kegiatan di Lingkungan Inspektorat Utama Badan Pusat Statistik Tahun 2025, uraian pekerjaan Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut: Pemantauan Tindak Lanjut BPK, Pengawasan Perencanaan dan Anggaran BPS, Pengawasan Pengelolaan BMN, Pengawasan Laporan Keuangan BPS, Pengawasan Pengelolaan Keuangan, Pengawasan atas Pengadaan Barang dan Jasa, Konsultansi Pengadaan Barang dan Jasa, serta Pendampingan BPK dan Pengawasan SPI Online.

Pada awal tahun 2025, Inspektorat Wilayah II menetapkan target kinerja dari setiap indikator tujuan dan sasaran sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II tahun 2025.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Realisasi dari target yang telah ditetapkan pada awal tahun tersebut, akan dimonitoring setiap triwulanan dalam bentuk matrik rencana aksi dan dilaporkan dalam bentuk laporan kinerja interim (laporan capaian kinerja triwulanan) dan laporan kinerja tahunan.

Sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 pasal 18, disebutkan bahwa setiap entitas Akuntabilitas Kinerja wajib menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan. Keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan maupun sasaran, akan dituangkan dalam laporan kinerja tahunan. Laporan ini tidak hanya memberikan informasi mengenai capaian kinerja yang telah diraih, tetapi juga memuat kendala yang dihadapi serta solusi yang diterapkan untuk mengatasi berbagai permasalahan pada masing-masing indikator kinerja. Harapannya, laporan ini dapat menjadi bahan masukan bagi para pemangku kepentingan dalam menyempurnakan perencanaan manajemen serta mendorong peningkatan kinerja Inspektorat Utama di masa mendatang. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025 bertujuan untuk:

- 1) Memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan kinerja yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 2) Memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II;
- 3) Menyediakan umpan balik yang berguna untuk memperbaiki kinerja Inspektorat Wilayah II di masa mendatang.

Dengan adanya laporan ini, diharapkan Inspektorat Utama dapat terus meningkatkan perannya sebagai pengawas internal yang efektif, mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, serta memperkuat akuntabilitas kinerja aparatur BPS secara keseluruhan.

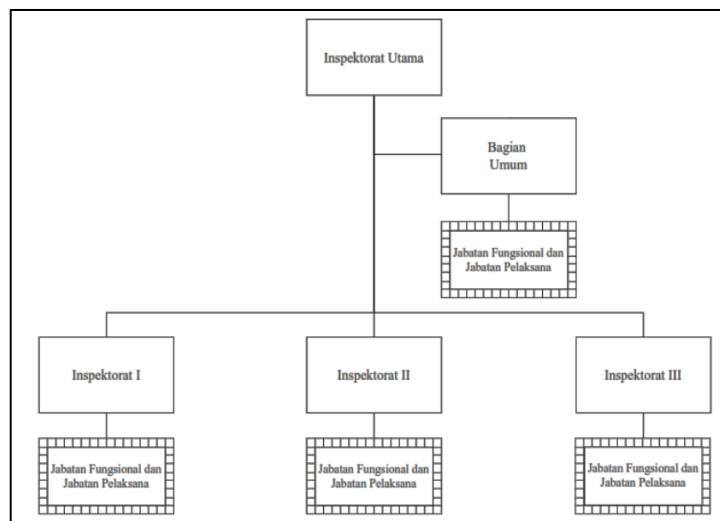
Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi

Sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, Inspektorat II (Inspektorat Wilayah II) bertugas melaksanakan pengawasan intern atas pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS. Dalam melaksanakan tugas, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi yaitu:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- 2) Pelaksanaan pengawasan internal terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- 3) Penyusunan laporan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan administrasi umum dan keuangan di lingkungan BPS;
- 4) Pelaksanaan administrasi di lingkup Inspektorat Wilayah II; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala.

Secara struktur organisasi, Inspektorat Wilayah II berada dibawah Inspektorat Utama BPS dipimpin oleh pejabat tinggi pratama setara eselon II yaitu Inspektur Wilayah II yang sejajar dengan unit kerja Inspektorat lainnya serta didukung oleh Bagian Umum. Inspektur membawahi pegawai dalam jabatan fungsional serta pelaksana.



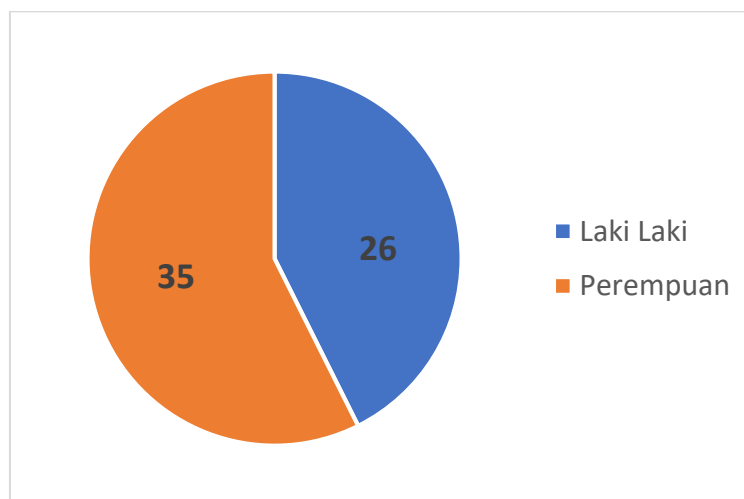
Gambar 1.1 Struktur Organisasi Inspektorat Utama BPS

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

1.3 Sumber Daya Manusia (SDM) dan Dukungan Anggaran

Salah satu unsur penting dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Wilayah II adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Dari tahun ke tahun Inspektorat Wilayah II berusaha meningkatkan kapasitas SDM baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Pada tahun 2025, terdapat perubahan komposisi pegawai di lingkungan Inspektorat Utama berupa perpindahan pegawai masuk dan keluar Inspektorat Wilayah II dari/ke Inspektorat Wilayah I dan Inspektorat Wilayah III yaitu masuk ke Inspektorat Wilayah II sebanyak 10 pegawai dan keluar dari Inspektorat Wilayah II sebanyak 10 pegawai. Selain itu, terdapat penambahan pegawai sebanyak 28 pegawai yang berasal dari penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta pengurangan 2 pegawai karena pensiun sehingga jumlah pegawai menjadi 61 pegawai.

Jumlah pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2025 menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak daripada jumlah pegawai laki-laki, yaitu 35 orang pegawai perempuan berbanding 26 orang pegawai laki-laki.



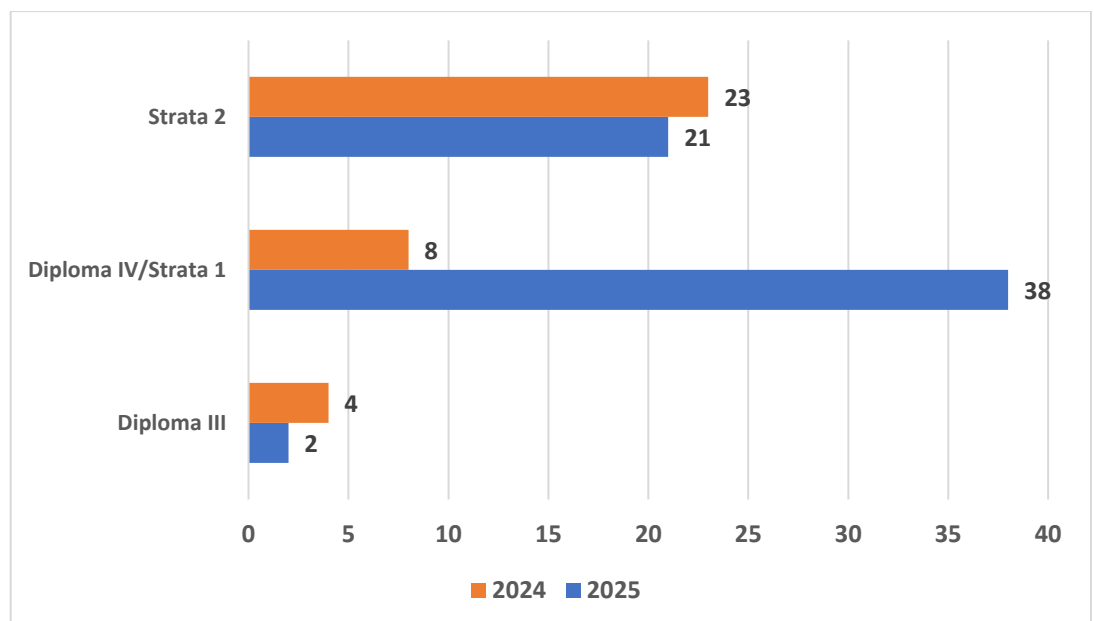
Gambar 1.2 Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jenis Kelamin Tahun 2025

Komposisi pegawai di Inspektorat Wilayah II baik dilihat dari jenjang pendidikan maupun jabatan fungsionanya sebagai berikut :

- a. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Jenjang pendidikan merupakan salah satu indikator untuk menilai kualitas SDM. Pegawai Inspektorat Wilayah II pada tahun 2025 yang memiliki tingkat pendidikan Diploma III sebanyak 2 pegawai, menurun dibandingkan dengan tahun 2024 karena terdapat 2 pegawai yang telah menyelesaikan studi S1. Untuk pegawai dengan jenjang pendidikan Diploma IV/S1, terdapat penambahan berasal dari pegawai yang telah menyelesaikan studi S1 serta penambahan dari penerimaan CPNS sebanyak 28 pegawai sehingga pegawai dengan tingkat pendidikan Diploma IV/S1 sebanyak 38 pegawai, sedangkan pegawai dengan tingkat pendidikan S2 adalah sebanyak 21 orang, menurun dari tahun sebelumnya karena perpindahan pegawai antar Inspektorat Wilayah. Berdasarkan komposisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kualitas pendidikan formal SDM Inspektorat Wilayah II sudah sangat baik. Adapun jumlah pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 1.3. Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2024-2025

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

b. Komposisi Pegawai Menurut Jenjang Jabatan Fungsional Auditor

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Pasal 7, Pegawai Negeri Sipil (PNS) dikelompokkan menurut kebutuhan jumlah dan jenis jabatan yang terdiri dari:

- 1) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT);
- 2) Jabatan Fungsional (JF); dan
- 3) Jabatan Administrasi (JA).

Pada akhir tahun 2025, terdapat perubahan pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur Wilayah II) karena pensiun pada bulan Agustus 2025 dan digantikan sementara oleh Pelaksana Tugas (Plt.) dari Inspektorat Wilayah II, sedangkan sisanya terbagi menjadi fungsional tertentu, fungsional lainnya dan fungsional umum yang merupakan CPNS yang belum dilantik dalam jabatan fungsional auditor. Gambaran komposisi pegawai Inspektorat Wilayah II Tahun 2025 menurut jabatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Inspektorat Wilayah II Menurut Jabatan

No	Jabatan	2024	2025
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Inspektur Wilayah II	1	1
2	Fungsional Auditor	33	32
	a. Auditor Madya	8	7
	b. Auditor Muda	12	14
	c. Auditor Pertama	7	6
	d. Auditor Penyelia	1	0
	e. Auditor Terampil	3	4
3	Fungsional Lainnya	0	1
	Statistisi Muda	0	1
4	Fungsional Umum	1	28
	Jumlah	35	61

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

c. Dukungan Anggaran

Untuk mencapai kinerja pada tahun 2025, telah dialokasikan anggaran sebesar Rp607.159.000,00 yang dituangkan dalam Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur BPS.

1.4 Potensi dan Permasalahan

Identifikasi berbagai potensi yang telah dimiliki oleh Inspektorat Wilayah II sebagai berikut:

- a. Program Kerja Pengawasan Tahunan yang disusun setiap awal tahun merupakan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan di lingkungan Inspektorat Utama dan Inspektorat Wilayah;
- b. Terdapat struktur penugasan yang jelas dari Inspektur, pengendali teknis, dan tim yang melaksanakan fungsi pengawasan serta dilaksanakan oleh pegawai dengan jabatan fungsional tertentu;
- c. Pengelolaan kinerja dan keuangan didukung oleh SOP dan Aplikasi yang memadai, serta terdapat pegawai yang melaksanakan fungsi penunjang pengawasan (selain auditor) pada Bagian Umum;
- d. Tersedianya SDM pengawasan yang berkualitas yaitu:
 - 1) seluruh pegawai yang melakukan pengawasan memiliki sertifikat auditor;
 - 2) terdapat auditor yang telah bersertifikasi kompetensi tertentu dan memperoleh peningkatan kompetensi teknis setiap tahun;
 - 3) pegawai-pegawai muda memiliki literasi digital yang tinggi sehingga adopsi teknologi terbaru menjadi optimal dalam pekerjaan.
- e. Terdapat layanan penunjang *Whistle Blowing System*, Unit Pengendali Gratifikasi, web Spider, Simwas, serta portal monitoring kinerja.

Selain memiliki potensi, Inspektorat Wilayah II memiliki permasalahan dalam menjalankan Tugas Pokok dan fungsinya dihadapkan pada beberapa hal berikut:

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

- a. Pemahaman auditor tentang tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern yang belum merata, disamping pemahaman proses bisnis kegiatan statistik yang kompleks;
- b. Terdapat kelemahan pada tatalaksana proses bisnis fungsi pengawasan, yaitu:
 - 1) masih terdapat pedoman pengawasan yang belum lengkap dan/atau belum dilakukan pembaharuan sesuai dengan kondisi terkini;
 - 2) dalam kegiatan pengawasan belum sepenuhnya diterapkan kendali mutu;
 - 3) belum terlaksananya teknik audit berbantuan komputer (TABK).
- c. Pengelolaan Anggaran kurang memadai, yaitu total anggaran Inspektorat hanya sebesar 0,05 persen dari total anggaran BPS

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan Akuntabilitas Kinerja memberi informasi pencapaian kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025. Sistematika laporan kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2025 disajikan sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan, pada bab ini disajikan latar belakang; maksud dan tujuan disusunnya laporan kinerja; tugas, fungsi, dan susunan organisasi BPS; sumber daya manusia di Inspektorat Wilayah II dan dukungan anggaran, potensi dan permasalahan yang dihadapi Inspektorat Wilayah II; serta sistematika penyajian laporan.

Bab II. Perencanaan Kinerja, pada bab ini disajikan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis BPS, Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja (PK) Inspektorat Wilayah II Tahun 2025.

Bab III. Akuntabilitas Kinerja, pada bab ini berisi Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2025, Perkembangan Capaian Kinerja Inspektorat Inspektorat Wilayah II, Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

II tahun 2025 terhadap Target Renstra 2025-2029, Analisis dan Evaluasi atas Capaian Kinerja, dan Realisasi Anggaran tahun 2025.

Bab IV. Penutup, pada bab ini berisi Kesimpulan dan Rekomendasi perbaikan untuk tahun berikutnya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Visi dan Misi Inspektorat Wilayah II

Dalam Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pusat Statistik Tahun 2025–2029, telah dijabarkan visi dan misi BPS sebagai arah pembangunan statistik nasional. Sejalan dengan hal tersebut, penjabaran visi dan misi, tujuan dan sasaran strategis Inspektorat Wilayah II mendukung kinerja Inspektorat Utama BPS tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II Tahun 2025–2029. Penggunaan rancangan awal Renstra karena sampai dengan Laporan Kinerja ini disusun visi, misi, tujuan di level unit kerja Inspektorat Wilayah II belum bisa ditetapkan. Renstra Inspektorat Wilayah II nantinya akan ditetapkan sebagai landasan dalam mencapai target kinerja hingga tahun 2029.

a. Visi

Inspektorat Utama selaku pengawas Internal BPS diharapkan mampu memberikan peringatan dini dan peningkatan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan statistik sehingga mendukung pencapaian visi BPS yaitu : “Lembaga yang Independen, Tepercaya, dan Berperan Aktif dalam Mendukung Perumusan Kebijakan Berbasis Data Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat Wilayah II merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi/kebijakan yang dituangkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Inspektorat Wilayah II tahun 2025-2029. Visi Inspektorat Wilayah II yakni:

“Menjadi mitra strategis dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik untuk mencapai visi Badan Pusat Statistik melalui pengawasan pengelolaan keuangan negara yang berkualitas”

Sebagai mitra strategis, Inspektorat Wilayah II berkomitmen memastikan seluruh kebijakan dan program Badan Pusat Statistik (BPS) dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efisien, dan efektif melalui pengawasan yang mencakup aspek pengelolaan keuangan negara. Inspektorat Wilayah II berupaya mengembangkan sistem pengendalian internal pengendalian risiko yang akurat dan analisis yang mendalam serta membantu BPS menghadapi tantangan strategis dalam transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. Disamping itu dilakukan pula peningkatan kompetensi auditor, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan, dan komunikasi yang efektif dengan seluruh unit kerja, sehingga Inspektorat Wilayah II berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola organisasi yang baik dan mendukung BPS mencapai visi organisasi.

b. Misi

Visi BPS diatas selanjutnya dijabarkan menjadi misi BPS antara lain : Menyediakan Data Statistik Berkualitas dan Insight untuk Perumusan Kebijakan dan Pengambilan Keputusan, Memperkuat Kepemimpinan BPS dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), dan Memperkuat kapasitas kelembagaan statistik yang efektif dan efisien. Berdasarkan misi BPS serta misi Inspektorat Utama, selanjutnya dijabarkan misi Inspektorat Wilayah II dalam melaksanakan pengawasan internal melalui kediatan penjaminan kualitas maupun konsultasi, serta mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi, yaitu sebagai berikut:

Misi 1 : Mendukung percepatan reformasi birokrasi melalui pengawasan internal yang mendorong terciptanya tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien.

Misi 2 : Melaksanakan pengawasan asurans yang independen, objektif, dan berbasis risiko untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan kegiatan.

Misi 3 : Memberikan layanan pengawasan konsultatif yang responsif dan solutif sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang mendorong peningkatan kinerja.

Misi 4 : Meningkatkan kapabilitas pengawasan internal yang adaptif terhadap dinamika organisasi dan mampu memberikan nilai tambah dalam pencapaian sasaran strategis BPS.

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi tersebut ditetapkan tujuan yang harus dicapai yang memiliki sasaran strategis pencapaian.

Tujuan: Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif dalam pengelolaan keuangan yang didukung kapabilitas pengawasan internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mendukung pencapaian tujuan BPS”.

Sasaran Strategis: Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan profesional

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan Inspektorat Wilayah II tahun 2025–2029 dan mendukung penguatan pengawasan, Inspektorat Utama telah merumuskan lima strategi penguatan transformasi yang menjadi arah kebijakan utama. Arah dan kebijakan strategi tersebut menjadi landasan bagi Inspektorat Wilayah II dalam menentukan fokus dan prioritas dalam kegiatan pengawasan internal yang akan dilakukan. Adapun lima strategi penguatan pengawasan Inspektorat Wilayah II adalah sebagai berikut:

- a. Penguatan Fungsi Pengawasan yang Adaptif dan Strategis
 - 1) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengawasan berbasis risiko (*risk-based auditing*) dengan mengacu pada dinamika perubahan lingkungan internal dan eksternal BPS;

- 2) Mendorong transformasi pengawasan dari pendekatan kepatuhan (*compliance based*) menuju pendekatan berbasis nilai dan risiko (*value-and risk-based*);
 - 3) Memastikan fungsi pengawasan menjadi bagian integral dalam mendukung pencapaian enam strategi transformasi BPS.
- b. Integrasi Pengawasan dalam Proses Bisnis dan Transformasi Statistik
- 1) Mengintegrasikan peran pengawasan dalam transformasi proses bisnis statistik, pen gumpulan data, serta penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN), guna menjamin kualitas, efisiensi, dan mitigasi risiko;
 - 2) Memberikan rekomendasi yang konstruktif dalam mendukung BPS menjadi rujukan statistik nasional dan internasional, sesuai dengan standar dan praktik terbaik.
- c. Penguatan Tata Kelola Risiko dan Pengendalian Intern
- 1) Mendorong penyusunan dan implementasi sistem manajemen risiko yang efektif di seluruh unit kerja BPS;
 - 2) Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan risiko strategis, operasional, dan reputasi, terutama dalam kegiatan prioritas nasional dan program transformasi kelembagaan;
 - 3) Membangun budaya pengendalian internal yang kuat melalui edukasi, asistensi dan monitoring implementasi pengendalian.

2.2 Target Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025-2029

Target kinerja merupakan penjabaran lebih operasional dari arah kebijakan strategis, yang diwujudkan melalui sasaran program dan sasaran kegiatan. Indikator kinerja disusun untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai tingkat pencapaian tujuan, baik pada tingkat outcome program maupun output kegiatan.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Inspektorat Wilayah II telah menetapkan indikator kinerja utama tahun 2025-2029. Indikator Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara adalah ukuran yang menggambarkan kualitas hasil pengawasan internal yang mencakup kegiatan assurance dan consulting. Ukuran nilai indikator tersebut diperoleh dari jumlah penilaian atas tiga komponen penyusun yakni:

- a. Tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK;
- b. Rata-rata persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang pengelolaan keuangan; dan
- c. Rata-rata nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang pengelolaan keuangan.

Selanjutnya atas indikator kinerja tersebut ditetapkan target kinerja selama periode tahun 2025 sampai 2029. Target ditetapkan berdasarkan pertimbangan logis serta memperhatikan kenaikan kinerja setiap tahunnya. Rincian target tercantum pada tabel berikut ini.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektorat Wilayah II BPS Tahun 2025 –2029

No	Tujuan/Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target (Persen)				
			2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<p>Tujuan : Mewujudkan percepatan reformasi birokrasi dan tata pemerintahan yang baik melalui pengawasan asurans dan konsultatif yang didukung kapabilitas pengawas internal yang terintegrasi dan berkelanjutan dalam mencapai tujuan BPS.</p> <p>Sasaran Strategis : Terwujudnya Kinerja Badan Pusat Statistik yang bersih, akuntabel, dan profesional</p>						
3.4	Sasaran kegiatan : Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas						
3.4.2	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58	75,91	80,25	84,58	88,90

2.3 Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Untuk memperkuat komitmen pencapaian kinerja, pada awal tahun ditetapkan target kinerja dalam Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2025 yang

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

bersumber dari indikator kinerja tujuan dan sasaran strategis yang harus dicapai dalam satu tahun. Target kinerja yang tercantum dalam Rencana Strategis diturunkan menjadi target dalam Perjanjian Kinerja setiap awal tahun.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

IKS	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
3.4.2	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58 %

Target diatas dipantau setiap triwulan untuk dilakukan evaluasi dan menetapkan rencana kerja sehingga target tahunan dapat dicapai.

2.4 Dukungan Inspektorat Wilayah II Terhadap Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

Badan Pusat Statistik (BPS) mengemban tanggung jawab terhadap pelaksanaan sejumlah Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional yang diwujudkan melalui berbagai program dan kegiatan strategis sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional:

1) Publikasi/Laporan Penyusunan Inflasi

Dalam rangka mendukung sasaran program prioritas berupa terkendalinya tingkat inflasi nasional sesuai dengan fundamental ekonomi, serta sasaran kegiatan prioritas terkait terjaganya komponen inflasi harga bergejolak.

2) Pemanfaatan *Big Data*

Kegiatan Pemanfaatan *Big Data* untuk Statistik Resmi mendukung Proyek Prioritas Nasional yang terkait dengan Tata Kelola Data serta Pengembangan dan Pemanfaatan *Emerging Technology*. Penentuan target jumlah dan jenis kegiatan statistik

yang memanfaatkan Big Data untuk statistik resmi selama periode 2025–2029 telah dilakukan dengan mempertimbangkan ketersediaan dan kapasitas SDM, serta dukungan anggaran yang tersedia.

Pada tahun 2025 aktivitas yang dilakukan berfokus pada optimalisasi pemanfaatan Mobile Positioning Data (MPD) untuk penghitungan statistik pariwisata seperti: Wisatawan Nusantara (Wisnus), Wisatawan Nasional (Wisnas); statistik mobilitas penduduk seperti Commuter, dan statistik ekonomi-sosial melalui indentifikasi wilayah metropolitan (*Metropolitan Statistical Area—MSA*).

b. Prioritas Presiden

- 1) Inpres nomor 4 tahun 2025 tentang Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
- 2) Inpres nomor 6 tahun 2025 terkait Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi.

Pelaksanaan Inpres Nomor 6 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Gabah, Beras dalam Negeri, serta Penyaluran Cadangan Beras Pemerintah dilakukan melalui dua kegiatan statistik utama, yaitu Survei KSA Padi dan Survei Ubinan Padi. Survei KSA Padi mencakup seluruh lahan pertanian, baik sawah maupun bukan sawah, dilaksanakan di 38 provinsi dan 488 kabupaten/kota, dengan metode pengumpulan data berbasis survei (sampling) menggunakan CAPI. Dengan melibatkan peranan teknologi, terkini, sehingga data produksi padi yang dikumpulkan menjadi lebih akurat, cepat dan tepat waktu. Kedua survei dilengkapi dokumentasi foto kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas.

- 3) Inpres nomor 8 tahun 2025 tentang Kemiskinan Ekstrem

Pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem diwujudkan melalui aktivitas utama, salah

satunya penghitungan tingkat kemiskinan ekstrem secara berkala.

4) Makan Bergizi Gratis

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) berkontribusi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perbaikan status gizi anak sekolah dan kelompok rentan, pengentasan kemiskinan melalui perluasan akses pangan bergizi terutama bagi masyarakat miskin, serta penguatan ekonomi melalui keterlibatan berbagai sektor dalam penyediaan makan bergizi. Dampak program MBG secara komprehensif diukur melalui Survei Monitoring dan Evaluasi Program MBG, yang terdiri dari Survei Khusus dan Survei Baseline. Dampak program MBG terhadap indikator ekonomi, ketenagakerjaan, dan sosial diukur melalui Survei Khusus. Pengukuran ini mencakup analisis terhadap pelaku usaha penyedia layanan makanan, serta perubahan konsumsi dan perilaku rumah tangga dari siswa yang menerima MBG.

c. Isu Strategis Nasional

1) Perpres nomor 12 tahun 2025 terkait Survei Kesejahteraan Petani.

Survei Kesejahteraan Petani (SKP) merupakan pelaksanaan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang diperkuat melalui Nota Kesepahaman antara Kementerian Pertanian dan BPS. Survei ini dilakukan untuk menghasilkan Indeks Kesejahteraan Petani (IKP) sebagai instrumen pengukuran berbasis data yang mencerminkan kondisi kesejahteraan rumah tangga usaha pertanian (RTUP).

2) Undang-undang nomor 16 tahun 1997 terkait melaksanakan Sensus Ekonomi.

3) Neraca Arus Energi dan Neraca Emisi GRK

Pelaksanaan kegiatan penyusunan Neraca Arus Energi dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) telah melalui beberapa tahapan penting. Pada tahap perencanaan, telah dilakukan pembahasan metodologi neraca arus energi dan emisi GRK berbasis *System of Environmental Economic Accounts (SEEA) Central Framework*. Selain itu koordinasi dengan Direktorat Statistik Industri sebagai penanggung jawab kegiatan (PJK) terkait di BPS dan Kementerian/Lembaga (K/L) seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (KESDM), Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Bank Indonesia untuk memastikan kesesuaian konsep serta ketersediaan data. Tahap pelaksanaan mencakup kegiatan pengumpulan dan integrasi data dari berbagai sumber kompilasi produk administratif.

- 4) Perpres 61 tahun 2024 dan Perpres 17 tahun 2025 terkait Data Komoditas Gula, Pergaraman, Jagung, Beras, Daging Lembu, Perikanan, Bawang Putih

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Perpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 61 Tahun 2024 mengenai Neraca Komoditas serta Perpres Nomor 17 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional, telah dilakukan kegiatan penyediaan data komoditas pangan strategis sebagai bahan evaluasi ketersediaan pasokan pangan nasional. Aktivitas ini berfokus pada pengumpulan, penyusunan, dan penyediaan data yang akurat untuk mendukung perencanaan kebutuhan pasokan dan memastikan stabilitas pangan nasional.

Sesuai dengan tugas fungsi pengawasan Inspektorat Wilayah II melaksanakan pengawasan keuangan terhadap pelaksanaan kegiatan diatas sebagai bagian dari upaya menjamin akuntabilitas, transparansi, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Pengawasan dilakukan melalui audit kinerja keuangan, reviu, monitoring, dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang dibiayai DIPA BPS maupun sumber lain. Aktivitas pengawasan pengelolaan keuangan yang dilakukan Inspektorat Wilayah II antara lain:

- a. Reviu anggaran pada DIPA BPS yang mendukung terlaksananya seluruh aktivitas pencapaian prioritas nasional maupun prioritas presiden, baik dari penetapan pagu awal sampai revisi DIPA sepanjang tahun. Aktivitas ini mendukung penyusunan anggaran terutama pada Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) yang didalamnya menampung anggaran kegiatan survei-survei BPS seperti survei harga untuk perhitungan inflasi, survei KSA serta ubinan padi, dan aktivitas pengumpulan data lainnya.
- b. Pengawasan atas proses pengadaan barang dan jasa baik melalui reviu dokumen maupun *probity* audit yang memberi jaminan (assurans) melaksanakan program-program tersebut baik di BPS pusat maupun BPS daerah, antara lain pada pengadaan:
 - 1) Peralatan teknologi informasi untuk mendukung kelancaran proses bisnis yang didukung ketersediaan server pusat;
 - 2) Pengadaan mobile positioning data sebagai upaya mendukung pemanfaatan big data.
 - 3) Pengadaan gedung bangunan kantor sebagai peningkatan sarana prasarana perkantoran, serta
 - 4) Pengadaan persiapan Sensus Ekonomi 2026.
- c. Pendampingan sebagai peran konsultasi untuk mendukung kepatuhan pengelolaan keuangan negara pada kegiatan survei dampak program MBG. Berkolaborasi dengan unit kerja Biro Keuangan BPS, Inspektorat Wilayah II melaksanakan pendampingan administrasi keuangan untuk mengurangi risiko penyimpangan dan kesalahan administrasi pertanggungjawaban keuangan kegiatan survei dampak program MBG.

2.5 Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

Anggaran keuangan yang diajukan dan ditetapkan untuk Inspektorat Wilayah II telah didasarkan pada Rencana Strategis Inspektorat Utama tahun 2025-2029. Pada awal tahun anggaran 2025 jumlah pagu awal Inspektorat Wilayah II sebesar Rp1.005.263.000,00 dengan nilai self blocking Rp.497.632.000,00. Namun dengan adanya kebijakan relaksasi anggaran dan setelah dilakukan revisi DIPA sampai bulan Agustus 2025 nilai pagu yang dapat digunakan sampai akhir tahun adalah Rp607.159.000,00.

Tabel 2.3 Rincian Pagu Anggaran Tahun 2025

Akun		Pagu (Rp)
(1)		(2)
522151	Belanja Jasa Profesi	17.600.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	534.519.000
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	55.040.000
Total		607.159.000

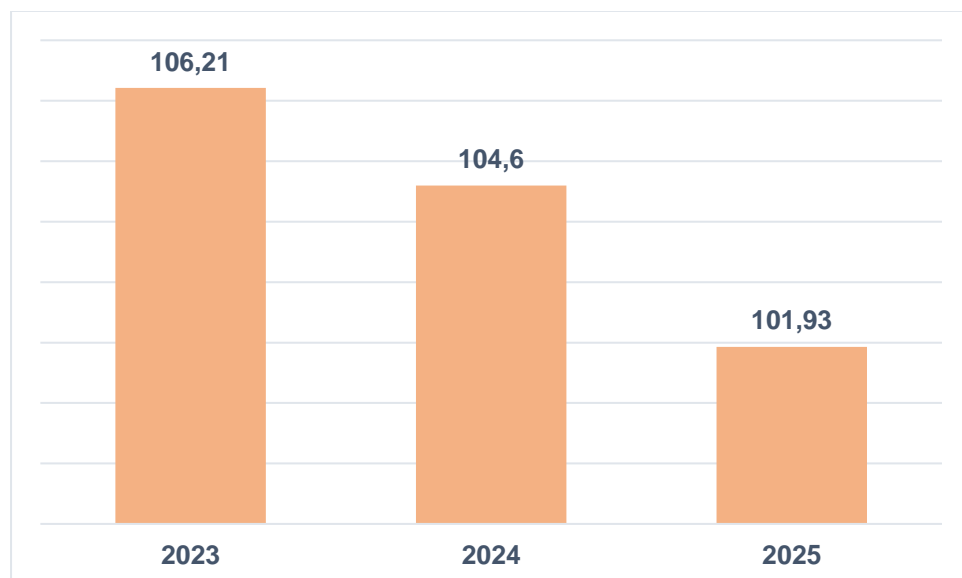
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Realisasi, Capaian Kinerja, dan Nilai Penilaian Kinerja Organisasi Tahun 2025

Capaian kinerja tujuan pada Tahun 2025 dihitung berdasarkan rata-rata realisasi target sasaran pada setiap indikator kinerja Inspektorat Wilayah II. Pada tahun 2025 capaian kinerja merupakan realisasi dari indikator Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara. Terdapat perubahan indikator kinerja dibandingkan dengan periode pelaporan kinerja tahun 2020-2024.

a. Perbandingan capaian kinerja total selama 2023-2025.

Pada tahun 2025, capaian kinerja Inspektorat Wilayah II tercatat sebesar 101,93, yang artinya telah melampaui target kinerja yang ditetapkan. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan rata-rata capaian kinerja tahun 2023 dan 2024, capaian tahun 2025 tercatat lebih rendah. Grafik dibawah ini menggambarkan capaian kinerja tahun 2025 sebesar 101,93 dimana lebih rendah dari capaian tahun-tahun sebelumnya.



Gambar 3.1 Rata-rata Target, Realisasi, dan Capaian Kinerja Total Indikator Tujuan Inspektorat Wilayah II Periode 2023-2025

Kondisi diatas tidak sepenuhnya mencerminkan penurunan kinerja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor teknis yaitu:

1) Perbedaan indikator penyusun kinerja

Pada tahun 2025 terjadi penyesuaian indikator kinerja sebagai dampak dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Perubahan indikator tersebut menyebabkan hasil pengukuran kinerja tidak sepenuhnya sebanding (*non-comparable*) dengan indikator pada periode Renstra sebelumnya (2020–2024), sehingga berdampak pada penurunan nilai capaian secara agregat.

2) Tahun awal implementasi Renstra 2025–2029

Tahun 2025 merupakan tahun transisi dan konsolidasi dalam penerapan Renstra baru, yang umumnya ditandai dengan penyesuaian target dan *baseline* kinerja serta penyempurnaan mekanisme pengumpulan dan pengukuran data kinerja. Kondisi tersebut wajar menyebabkan capaian kinerja pada tahun awal Renstra belum optimal dibandingkan tahun-tahun berikutnya.

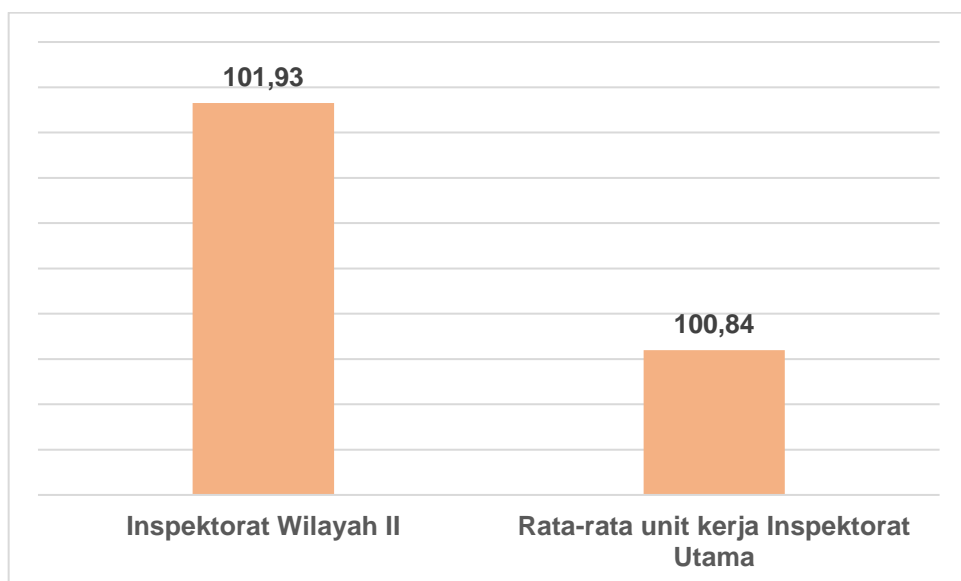
b. Nilai Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) tahun 2025

Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian pelaksanaan program, kegiatan, atau aktivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran dari Inspektorat Wilayah II. Perhitungan PKO mengacu ke Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024. Dengan melihat nilai implemetasi AKIP Insprketorat Wilayah II tahun 2024 yang sebesar 75,55 dengan kategori BB dan capaian kinerja sebesar 101,93%, nilai PKO Inspektorat Wilayah II tahun 2025 sebesar 91,74 dengan predikat “Baik” yang mencerminkan tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

- c. Nilai *benchmarking* capaian kinerja terhadap rata-rata capaian kinerja unit kerja Eselon I

Nilai capaian kinerja Inspektorat Wilayah II tahun 2025 sebesar 101,93%, sedangkan rata-rata nilai seluruh unit kerja dibawah Inspektorat Utama yang terdiri atas tiga unit kerja Inspektorat adalah sebesar 100,84. Dengan demikian capaian kinerja Inspektorat Wilayah II berada diatas rata-rata capaian unit kerja Inspektorat Utama tahun 2025. Hal ini menggambarkan kepatuhan pelepasan, penyelesaian kegiatan pengawasan beserta dokumen kendali mutu yang dihasilkan telah baik, dan terjaga kualitasnya. Keseluruhan tim kerja telah memahami tugas-tugas pengawasan dan telah menghasilkan output rekomendasi pengawasan yang memberikan nilai tambah untuk pencapaian sasaran instansi.



Gambar 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Inspektorat Wilayah II dengan Rata-rata Capaian Kinerja Inspektorat Utama

Upaya yang telah dilakukan adalah dengan melaksanakan penugasan sesuai dengan dinamika dan tujuan pengawasan sehingga berjalan lebih efektif dan efisien secara waktu, mengingat jenis pengawasan yang dilaksanakan Inspektorat Wilayah II sangat beragam, mempunyai obyek unit kerja yang sangat banyak, dan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

bersifat rutin. Penggunaan media aplikasi dan penyeragaman format kertas kerja pengawasan juga mendukung tercapainya target dan ketepatanwaktuan penyelesaian penugasan sehingga nilai kinerja tercapai melebihi target.

- d. Perbandingan target, realisasi dan capaian kinerja per sasaran tahun 2023-2025.

Jumlah sasaran kinerja yang menjadi target pada tahun 2025 hanya ada 1(satu) sasaran dengan 1 (satu) indikator kinerja didalamnya, dan merupakan tahun pertama penggunaan indikator karena merupakan periode awal Renstra.

Tabel 3.1 Target, Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target			Realisasi			Capaian Kinerja (%)		
		2023	2024	2025	2023	2024	2025	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)			(4)			(5)		
Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Persen			71,58			72,96			101,93
IKS Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	N/A (Belum dijadikan indikator)		71,58	N/A (Belum dijadikan indikator)		72,96	N/A (Belum dijadikan indikator)		101,93

Pada tahun 2025 realisasi nilai Pengelolaan Keuangan Negara sebesar 72,96 %. Angka tersebut melebihi dari target yang sebesar 71,58% dengan capaian sebesar 101,93%. Hal ini dapat menggambarkan target pengawasan telah selesai dilaksanakan dan telah sesuai dengan standar mutu pengawasan yang ditetapkan yaitu:

- 1) Pemenuhan dokumen kebijakan yang terdiri atas SOP dan pedoman kegiatan
- 2) Pemenuhan norma hasil atau laporan hasil pengawasan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

- 3) Pemenuhan dokumen kendali mutu pengawasan
- 4) Kualitas ketepatanwaktuan penyampaian dokumen

Realisasi kinerja tahun 2025 dapat melebihi target disebabkan faktor ketepatanwaktuan penyampaian dokumen hasil pengawasan yang menjadi penambah nilai realisasi kinerja. Formulasi perhitungan kinerja diperoleh dari dasar hitung sebagai berikut:

$$NPKK = 0,15x_1 + 0,75x_2 + 0,10x_3$$

Keterangan:

NPKK = Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

x_1 = Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

x_2 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Asurans Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

x_3 = Rata-Rata Persentase Nilai Kualitas Kegiatan Pengawasan Konsultansi Bidang Pengelolaan Keuangan Negara

Perhitungan target masing-masing komponen berdasarkan bobot sebagai berikut:

Tabel 3.2 Target Indikator Kinerja Berdasarkan Bobot

Kode Kinerja	Indikator Kinerja	Bobot	Satuan	Target 2025	Target Bobot
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IKS 3.4.2.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	100%	Persen	71,58	71,58
3.4.2.1a.	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	15%	Persen	80,50%	12,08
3.4.2.1b.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan assurans bidang pengelolaan keuangan negara (%)	75%	Persen	70%	52,50
3.4.2.1c.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang pengelolaan keuangan negara (%)	10%	Persen	70%	7

e. Analisis capaian kinerja tahun 2025

Kegiatan pengawasan Inspektorat Wilayah II dilakukan oleh tim terbagi berdasarkan area-area pengawasan yang menjadi tugas

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

fungsi Inspektorat Wilayah II yang berjumlah 8 tim pengawasan antara lain:

Tabel 3.3 Lingkup Pengawasan Tim Inspektorat Wilayah II

NO	LINGKUP PENGAWASAN	URAIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)
1	Pemantauan Tindak Lanjut BPK	Monitoring atas penyelesaian tindak lanjut pemeriksaan BPK termasuk ADTT atas rekomendasi BPK
2	Pengawasan Perencanaan dan Anggaran BPS	Reviu, monitoring, dan evaluasi perencanaan dan anggaran BPS
3	Pengawasan Pengelolaan BMN	Reviu dan pengawasan lainnya atas BMN selain Audit Kinerja atas BMN
4	Pengawasan Laporan Keuangan BPS	Reviu dan <i>consulting non advisory</i> atas Laporan Keuangan BPS
5	Pengawasan Pengelolaan Keuangan	Audit kinerja pengelolaan PNBK, aset, dan keuangan pada Satker BPS
6	Pengawasan Atas Pengadaan Barang dan Jasa	Audit dan probity audit PBJ pada Satker BPS, serta pemantauan P3DN dan PAPBJ BPS
7	Konsultansi Pengadaan Barang Jasa	Pendampingan dan konsultansi PBJ pada Satker BPS
8	Pendampingan BPK dan Pengawasan Pemantauan Pengelolaan Keuangan (melalui SPI Online/Spider)	Pendampingan atas kegiatan pemeriksaan yang dilakukan BPK dan pengawasan SPI Online/Spider

Hasil pengawasan dari seluruh tim berkontribusi atas pencapaian target kinerja Inspektorat Wilayah II dan seluruh target kinerja pada setiap tim yang mendapat penugasan telah dapat dipenuhi.

Dalam upaya mencapai target kinerja, ditemui kendala-kendala serta permasalahan baik internal maupun eksternal. Seluruh tim telah mampu mencari solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul. Secara umum ringkasan kendala yang muncul selama tahun 2025 adalah:

- 1) Referensi pedoman pengawasan tidak terlalu banyak
- 2) Ikhtisar pemantauan tindak lanjut rekomendasi oleh BPK tidak rutin disampaikan
- 3) Dinamika perubahan metode pengawasan pemantauan keuangan
- 4) Tindak lanjut atas hasil pengawasan belum sepenuhnya dilakukan dan dilaporkan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Untuk mengatasi kendala-kendala diatas dilakukan solusi :

- 1) Menggunakan peraturan instansi pembina pengawasan seperti BPKP
- 2) Perhatian atas rekomendasi BPK yang selesai oleh tim
- 3) Perubahan mekanisme pemantauan yang lebih sederhana
- 4) Koordinasi dengan subject matter terkait tindak lanjut hasil pengawasan

Berdasarkan pembagian bobot kinerja pada subbab sebelumnya, rincian realisasi dari masing-masing komponen indikator kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.4 Target dan Realisasi Kinerja Berdasarkan Realisasi Bobot

Kode Kinerja	Komponen Indikator	Target Bobot	Realisasi Bobot	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.2.1a.	Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	12,08	12,31	101,90%
3.4.2.1b.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan asurans bidang pengelolaan keuangan	52,5	53,9	102,67%
3.4.2.1c.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultasi bidang pengelolaan keuangan	7	6,75	96,43%
IKS 3.4.2.1	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58	72,96	101,93%

Selanjutnya akan dijelaskan lebih rinci capaian kinerja untuk masing-masing komponen indikator kinerja beserta penjelasan aktivitas pengawasan yang mendukung pencapaian kinerja, kendala yang dihadapi, serta solusi yang telah dilakukan.

f. Capaian kinerja Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK

Tabel 3.5 Realisasi Kinerja Tindak Lanjut Pemeriksaan BPK

Kode Kinerja	Komponen Indikator	Target Bobot	Realisasi Bobot	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.2.1a.	Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan BPK	12,08	12,31	101,90%

Aktivitas pengawasan yang dilakukan antara lain adalah melaksanakan monitoring atas penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. Tim melakukan koordinasi dan juga melaksanakan pengawasan lanjutan sebagai bagian memenuhi rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Perhitungan kinerja adalah :

Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Rekomendasi TLBPK = $(X/Y) * 100$

X = jumlah rekomentasi BPK yang sesuai menurut BPK

Y = jumlah rekomendasi BPK sejak tahun 2004

Perhitungan realisasi adalah sebagai berikut:

Jumlah rekomendasi sampai 2025 yang diselesaikan: $685 / 835 = 82,04\%$

Target rekomendasi 2025 yang diselesaikan: $640 / 795 = 80,50\%$

Dengan demikian sesuai perhitungan bobot 15% maka diperoleh nilai realisasi kinerja 12,31 dengan capaian 101,90%.

Kendala-kendala yang ditemui serta solusi yang telah dilakukan oleh tim pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK antara lain :

Kendala:

BPK belum menerbitkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut untuk Semester I dan II Tahun 2024, serta Semester I Tahun 2025 dan belum membuat halaman pengunggahan bukti tindak lanjut dari rekomendasi LHP LK TA 2024 di SIPTL.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Solusi :

Melalui Plt Sekretaris Utama telah bersurat kepada Direktur Jenderal PKN II BPK RI Nomor B-1042/02000/KU.520/2025 tanggal 18 Desember 2025 hal Permohonan Penyampaian Tindak Lanjut Rekomendasi BPK atas LHP LK BPS 2024

- g. Capaian kinerja nilai kualitas kegiatan pengawasan assurance bidang pengelolaan keuangan

Tabel 3.6 Realisasi Kinerja Nilai Pengawasan Assurance

Kode Kinerja	Komponen Indikator	Target Bobot	Realisasi Bobot	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.2.1b.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan assurance bidang pengelolaan keuangan	52,5	53,9	102,67%

Perhitungan nilai tersebut didasarkan rata-rata persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan assurance bidang pengelolaan keuangan dengan melihat kriteria utama, yaitu Komponen Regulasi Pengawasan (10%), Kualitas Pengawasan (30%), Kendali Mutu Pengawasan (20%), dan Laporan Pengawasan (40%). Aktivitas pengawasan assurance bertujuan untuk memberi jaminan atas sebuah kegiatan baik jaminan secara luas maupun terbatas yang dilakukan melalui kegiatan audit, review, monitoring, dan evaluasi.

Sepanjang tahun 2025 aktivitas pengawasan assurance yang dilakukan tim Inspektorat Wilayah II adalah:

- 1) Pengawasan perencanaan dan anggaran, aktivitas yang dilakukan antara lain: review anggaran maupun revisi DIPA BPS sepanjang tahun 2025, dan review pagu alokasi anggaran TA 2026;
- 2) Pengawasan pengelolaan BMN, aktivitas yang dilakukan antara lain: review RKBMN 2025-2027, serta review pemanfaatan BMN;

- 3) Pengawasan laporan keuangan BPS, aktivitas yang dilakukan antara lain: melaksanakan revidu Laporan Keuangan triwulanan maupun tahunan;
- 4) Pengawasan pengelolaan keuangan, aktivitas yang dilakukan antara lain: audit pengelolaan keuangan serta audit kinerja pengelolaan BMN;
- 5) Pengawasan atas pengadaan barang dan jasa, aktivitas yang dilakukan antara lain: revidu penyerapan anggaran dan pengadaan barang/jasa, revidu dokumen pengadaan barang jasa, dan audit maupun probity audit pengadaan barang jasa;
- 6) Pengawasan SPI online, aktivitas yang dilakukan yaitu pemantauan dokumen pengelolaan keuangan dan barang melalui aplikasi SPIDER.

Kontribusi masing-masing aktivitas diatas terhadap nilai kinerja pengawasan assurans dapat dilihat pada **Lampiran 7**.

Kendala-kendala yang ditemui serta solusi yang telah dilakukan oleh tim untuk mencapai nilai pengawasan assurans yang optimal antara lain:

Kendala:

- 1) Tindak lanjut atas hasil revidu yang melewati batas waktu yang telah ditetapkan pada Berita Acara Kesepakatan Tindak Lanjut. Dari 8 revidu DIPA, hanya 3 revidu yang telah ditindaklanjuti;
- 2) Waktu revidu yang terbatas dengan tim yang belum berpengalaman serta terdapat kendala approval saat permintaan akses ke aplikasi SIMAN oleh admin, karena format pengajuan akses tidak sesuai;
- 3) Rekomendasi hasil revidu laporan keuangan triwulan III tahun 2025 belum semuanya ditindaklanjuti oleh Instansi;
- 4) Rekomendasi audit yang diberikan cukup banyak dan komprehensif sehingga perlu dilakukan pembahasan lebih lanjut dengan auditi dan membuat komitmen pelaksanaan

penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi dapat dilakukan dengan segera;

- 5) Dokumen/ data yang diperlukan dalam penugasan pengawasan terlambat diterima serta penugasan yang tumpang tindih dalam waktu yang bersamaan;
- 6) Aplikasi SPIDER belum bisa digunakan untuk permindok BPK karena kendala security aplikasi dari BPS dan BPK.

Solusi:

- 1) Mengirimkan nota dinas penyelesaian tindak lanjut dari semua Berita Acara reuiu anggaran yang belum ditindaklanjuti;
- 2) Koordinasi dan pembahasan intens dengan Biro Umum dan Biro Perencanaan;
- 3) Melakukan Monitoring Tindak Lanjut untuk dokumen yang belum dapat dipenuhi pada waktu periode reuiu:
- 4) Melakukan pembahasan dengan auditi untuk dapat melakukan *breakdown timeline* penyelesaian rekomendasi hasil audit;
- 5) Melakukan koordinasi dengan *subject matter* terkait kebutuhan dokumen/data yang diperlukan dalam pengawasan;
- 6) Pengunduhan dokumen dari aplikasi SPIDER oleh tim SIS untuk dipindahkan ke drive.bps.go.id.

- h. Capaian kinerja nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang pengelolaan keuangan

Tabel 3.7 Realisasi Kinerja Nilai Pengawasan Konsultansi

Kode Kinerja	Komponen Indikator	Target Bobot	Realisasi Bobot	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3.4.2.1c.	Rata-Rata Persentase nilai kualitas kegiatan pengawasan konsultansi bidang pengelolaan keuangan	7	6,75	96,43%

Pada tahun 2025, realisasi nilai kualitas pengawasan konsultansi masih dibawah target, dengan capaian 96,43%. Hal ini disebabkan belum terpenuhinya beberapa dokumen pengawasan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

pendampingan pemeriksaan BPK. Aktivitas pengawasan konsultansi adalah peran Inspektorat Wilayah II dalam memberi masukan dan rekomendasi untuk mitra melalui kegiatan pemberian saran/masukan (*advisory*), pendampingan/asistensi, maupun fasilitasi. tahun 2025 antara lain:

Realisasi nilai diperoleh dari aktivitas konsultansi Inspektorat Wilayah II antara lain:

- 1) Konsultansi pengadaan barang jasa pada pendampingan kepada mitra kerja terutama pada proses pengadaan barang jasa: Penugasan pendampingan pematangan lahan, pembangunan gedung BPS, pengadaan sumur bor, konsultasi pengadaan TI direktorat SIS dan pengadaan rompi SE 2026.
- 2) Konsultansi pada pendampingan pemeriksaan BPK.

Kontribusi masing-masing aktivitas diatas terhadap nilai kinerja pengawasan konsultansi dapat dilihat pada **Lampiran 8**.

Kendala-kendala yang ditemui serta solusi yang telah dilakukan oleh tim untuk mencapai nilai pengawasan konsultansi antara lain:

Kendala:

- 1) Koordinasi kesestamaan dan inspektorat utama untuk pembagian tugas dan fungsi tim LO/pendampingan BPK yang lebih jelas;
- 2) Referensi pedoman pendampingan PBJ masih terbatas, pendamping minim pengetahuan spesifikasi pengadaan TI dan rompi SE2026 disamping itu pendampingan konstruksi membutuhkan pemeriksaan fisik teknis bangunan di lapangan.

Solusi:

- 1) Telah melaksanakan koordinasi via zoom, namun belum ada SK Tim LO instansi;
- 2) Menggunakan referensi dari pedoman pengawasan PBJ dari BPKP, dan materi Diklat peran konsultansi, rutin mengikuti rapat pembahasan pengadaan dengan melibatkan pihak-pihak yang berkompeten dan melaksanakan pengecekan lapangan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

pekerjaan konstruksi dengan melibatkan tim pendamping yang mengerti teknis bangunan.

Sebagai upaya perbaikan di tahun 2026 dan untuk meningkatkan capaian kinerja, maka perlu disusun rencana tindak lanjut yang meliputi rencana setiap tim pengawasan baik rencana triwulanan maupun tahunan. Dengan adanya rencana tindak lanjut ini dapat menjadi panduan tim pengawasan yang ditugaskan. Lebih rinci rencana tindak lanjut, penanggungjawab, dan target waktu dijabarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.8 Rencana Tindak Lanjut Tahun 2026

No	Rencana Tindak Lanjut	PIC Tindak Lanjut	Batas Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Berkoordinasi dengan Tim Pemantauan BPK atas pemantauan tindak lanjut yang telah disampaikan	Koordinator Pemantauan Tindak Lanjut BPK	30 Maret 2026
2.	Membuat laporan monitoring tindak lanjut reviu anggaran tahap ke- 2	Koordinator Pengawasan Asurans atas Perencanaan dan Pelaporan Pengelolaan Keuangan Negara	30 Maret 2026
3.	Memperbaiki SOP BMN lainnya		
4.	Melaksanakan koordinasi dengan Biro Keuangan dan Biro Umum untuk hasil reviu yang belum ditindaklanjuti dan berpengaruh terhadap Laporan Keuangan Tahunan Tahun 2025		
5.	Surat pemberitahuan penyelesaian tindak lanjut hasil audit pengelolaan BMN dan Penyusunan Laporan Monitoring penyelesaian Tindak Lanjut hasil Audit Kinerja Pengelolaan BMN	Koordinator Pengawasan Assurans atas Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Negara	30 Maret 2026
6.	Penyusunan laporan hasil probity audit tahap serah terima pengadaan infrastruktur IT TA 2025		
7.	Koordinasi dengan tim SIS terkait aplikasi SPIDER		
8.	Rapat koordinasi dengan tim kesestamaan terkait pembagian	Koordinator Pengawasan Konsultansi atas	30 Maret 2026

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

No	Rencana Tindak Lanjut	PIC Tindak Lanjut	Batas Waktu
(1)	(2)	(3)	(4)
	tugas dan fungsi dalam pendampingan	Pengelolaan Keuangan Negara	
9.	Menyusun perencanaan pengawasan konsultansi PBJ pada pengadaan yang dinilai berisiko tinggi.		

Disamping itu terdapat pula rencana tindak lanjut yang akan dilakukan sepanjang tahun sampai dengan akhir tahun (triwulan IV) tahun 2026 yang harus dilakukan seluruh koordinator tim pengawasan pengelolaan keuangan antara lain:

- 1) Pelaksanaan pengawasan sesuai dengan tim pelaksana pengawasan yang baru di tahun 2026;
- 2) Monitoring progress pelaksanaan pengawasan triwulanan, semesteran, dan tahunan;
- 3) Pememuhan dokumen kendali mutu secara rutin dan tepat waktu.

3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Renstra 2025-2029

Perbandingan kinerja tahun 2025 terhadap target Renstra digunakan untuk melihat capaian target tahun berjalan dibandingkan dengan target akhir Renstra. Nilai capaian menjadi bahan evaluasi dalam menentukan target dan kebijakan di tahun mendatang dan menjaga fokus ketercapaian target Renstra 2025-2029.

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Renstra

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Target 2029*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025	Capaian Terhadap Target 2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sasaran Kegiatan: Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi					101,93	82,07

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

IKS : Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	71,58	88,90	72,96	101,93	82,07
--	--------	-------	-------	-------	--------	-------

**)Target Renstra sesuai surat Plt. Sestama Nomor B-142/02000/PR.110/2025 tanggal 14 Maret 2025 perihal : Penyampaian Metadata IKU, Konfirmasi Baseline, Target IKU 2025-2029, dan Indikator Proksi IKU.*

Data tersebut menunjukkan bahwa capaian Inspektorat Wilayah II tahun 2025 mampu melampaui target yang ditetapkan dan masih dalam jangkauan nilai yang relevan untuk mencapai target tahun 2029. Realisasi tahun 2025 sebesar 82,07% dari target 2029 menggambarkan kinerja ditahun-tahun mendatang perlu dijaga dengan tetap menjalankan fungsi pengawasan baik pada pemantauan tindak lanjut pemeriksaan BPK, pengawasan assurans, maupun konsultasi pengelolaan keuangan. Faktor-faktor yang mendorong ketercapaian target secara umum adalah bertambahnya jumlah SDM dan tersusunnya pedoman maupun standar operasional pengawasan. Sementara faktor penghambat adalah terdapat perubahan komposisi maupun lingkup penugasan pada tim pengawasan sehingga memerlukan penyesuaian.

3.3 Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional Tahun 2025

a. Output Pengawasan Kegiatan Prioritas Nasional, Prioritas Presiden, dan Isu Strategis Nasional

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, tugas fungsi Inspektorat Wilayah II dalam mendukung kegiatan prioritas nasional, prioritas presiden, serta isu strategis nasional merupakan tugas pendukung melalui pengawasan pengelolann keuangan negara. Aktivitas pengawasan yang dilakukan antara lain reviu terhadap anggaran/DIPA, pengawasan pengadaan barang jasa, audit pengelolaan keuangan negara, serta pendampingan adminitrasi keuangan. Output yang telah dihasilkan melalui kegiatan pengawasan untuk mendukung upaya pencapaian kegiatan prioritas antara lain adalah:

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

- 1) Laporan reviu anggaran, reviu revisi DIPA, beserta monitoring tindak lanjut hasil reviu atas anggaran pendukung survei maupun pengumpulan data statistik lainnya. Hal ini secara tidak langsung mendukung terciptanya penganggaran yang efektif efisien pada kegiatan pengumpulan data untuk penyusunan laporan inflasi, dan kegiatan lapangan KSA.
 - 2) Laporan audit kinerja pengelolaan keuangan dan audit pengadaan barang jasa yang mendukung pengelolaan keuangan negara pada unit kerja pusat/daerah;
 - 3) Probity Audit atas kegiatan Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan pada bulan Desember 2025 serta pendampingan pengadaan barang persiapan SE 2026;
 - 4) Probity audit pengadaan perangkat TI untuk peningkatan kapasitas server peremajaan perangkat pendukungnya.;
 - 5) Pendampingan administrasi serta supervisi pelaksanaan survei dampak program MBG tahun 2025.
- b. Kendala, solusi, dan rencana tindak lanjut pengawasan kegiatan prioritas
- Disamping analisis kendala serta solusi yang sudah disampaikan pada subbab sebelumnya, tim pengawasan Inspektorat Wilayah II menghadapi kondisi dan dinamika antara lain:
- 1) Pelaksanaan pengawasan belum berjalan secara optimal dikarenakan tidak masuk dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang direncanakan di awal tahun 2025.
 - 2) Kompetensi auditor pada bidang statistik yang masih terbatas, sehingga membutuhkan waktu lebih lama dalam memahami istilah dan konsep statistik;
 - 3) Sebagian besar kegiatan prioritas belum dilengkapi dengan pengelolaan manajemen risiko, hanya DTSEN yang telah teridentifikasi pada manajemen risiko program prioritas nasional.

Dengan demikian pendekatan pengawasan belum sepenuhnya berbasis risiko.

Atas kondisi-kondisi yang ditemukan pada pengawasan program prioritas, perlu melakukan upaya tindak lanjut sebagai perbaikan di tahun mendatang yaitu:

- 1) Memetakan seluruh potensi risiko dan memperluas objek pengawasan Tahun 2026, seperti audit kinerja Sensus Ekonomi, KSA, DTSEN, dan kegiatan lainnya, sehingga perencanaan pengawasan menjadi lebih matang;
- 2) Pemetaan latar belakang pendidikan auditor dengan memprioritaskan lulusan statistik untuk bergabung dalam tim yang melaksanakan audit kinerja terkait kegiatan statistik.

3.4 Prestasi dan Inovasi

Pada tahun 2025 terdapat prestasi Inspektorat Wilayah II berupa penghargaan atas pengelolaan arsip yaitu nilai Audit Kearsipan Internal sebesar 85,810 dengan kategori A (memuaskan). Meskipun bukan merupakan penghargaan kinerja terkait tugas fungsi utama pengawasan namun dukungan pengelolaan arsip merupakan hal utama pada pengelolaan norma hasil pengawasan serta dokumen pendukung lainnya. Meskipun sudah mencapai nilai memuaskan namun masih terdapat area pengelolaan arsip yang dapat ditingkatkan dan akan menjadi perhatian kedepan.

Sedangkan sebagai upaya inovasi, Inspektorat Wilayah II menyusun media pengawasan pengelolaan keuangan dan barang untuk seluruh unit kerja BPS baik pusat maupun daerah. Bentuk media tersebut menggunakan web yang dinamai "Spider" yang mempunyai makna *system of periodic document evaluation dan reporting* yang dapat diakses pada tautan spider.web.bps.go.id.

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Melalui Spider, auditor dapat melakukan pemantauan dan verifikasi dokumen, menelaah, memastikan kelengkapan dan keabsahan dokumen, serta memberi informasi apabila terdapat ketidaksesuaian dengan peraturan. Selanjutnya unit kerja dapat memperbaiki dan dokumen dapat digunakan sebagai bagian dari data sumber penyusunan laporan keuangan, pengawasan internal lanjutan maupun audit pihak eksternal. Bukti dukung atas prestasi dan inovasi terdapat pada lampiran.

3.5 Realisasi dan Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, Inspektorat Wilayah II didukung oleh dana yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2025, pagu anggaran yang dapat digunakan oleh Inspektorat Wilayah II adalah sebesar Rp607.159.000,00 dengan realisasi mencapai Rp601.341.809,00 atau sebesar 99,04%.

Tabel 3.10 Realisasi Anggaran Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Kode Unit Kerja	Nama Unit Kerja	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8200	Inspektorat Wilayah II	607.159.000	601.341.809	99,04

Keseluruhan anggaran diatas, dipergunakan untuk pembiayaan aktivitas pengawasan yang kinerjanya diukur dengan capaian indikator kinerja sasaran yang ditetapkan. Data berikut menampilkan perbandingan antara nilai realisasi anggaran dengan capaian kinerja terhadap target tahun 2025 yang menjadi nilai efisiensi penggunaan anggaran,

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Tabel 3.11 Nilai Efisiensi Anggaran

Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/ Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025*)	Realisasi 2025	Capaian Terhadap Target 2025 (%)	PAGU yang dapat digunakan 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran 2025 (Rp)	Persentase Realisasi Anggaran 2025 (%)	Efisiensi **)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Sasaran: Terwujudnya Tata Pemerintahan yang baik di Badan Pusat Statistik melalui Pengawasan Berkualitas								
IKS : Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	Persen	71,58	72,96	101,93	607.159.000	601.341.809	99,04	1,03

*) Target 2025 diambil dari target PK terakhir

**) dihitung dari Capaian terhadap target 2025 (%) / Persentase realisasi anggaran 2025 (%)

Berdasarkan data diatas, nilai efisiensi anggaran Inspektorat Utama sebesar 1,03. Nilai efisiensi yang lebih besar dari 1 menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan efisien secara anggaran. Hal ini tercermin dari capaian kinerja yang melebihi target, yaitu realisasi kinerja sebesar 100,87% dari target yang ditetapkan, sementara realisasi anggaran hanya mencapai 97,89% dari pagu yang dapat digunakan. Dengan kata lain, Inspektorat Wilayah II mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dari yang direncanakan dengan penyerapan anggaran yang lebih rendah dari alokasi maksimal.

Inspektorat Wilayah II telah melakukan upaya efisiensi untuk menyesuaikan kebijakan efisiensi yang diterapkan oleh Badan Pusat Statistik terkait Perjalanan Dinas selama tahun 2025, antara lain:

- 1) Penghematan akomodasi berupa transport ke bandara maupun dari bandara;
- 2) Penghematan akomodasi berupa penginapan dengan mekanisme satu kamar digunakan oleh dua orang dengan jenis kelamin yang sama; dan

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

- 3) Penggunaan kendaraan dinas untuk perjalanan dinas dengan yang wajar (Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Banten, dan Jawa Tengah)

Tabel 3.12 Nilai Efisiensi Anggaran Perjalanan Pengawasan

Akun	Nilai pada KAK (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Persentase Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
524111	451.159.069	380.865.467	70.293.602	15,58%

Dari upaya efisiensi anggaran di atas, Inspektorat Wilayah II dapat melaksanakan kegiatan pengawasan tambahan sebagai komitmen melakukan penjaminan atas pengelolaan keuangan BPS dengan rincian seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3.13 Rincian Kegiatan Pengawasan Hasil Efisiensi

Kegiatan	Nilai pada KAK (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Persentase Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pemantauan Pelaksanaan Implementasi SPIDER pada BPS Provinsi Jawa Timur dan BPS Kota Malang	7.564.500	4.013.900	3.550.600	46,94%
Pemantauan Pelaksanaan Implementasi SPIDER pada BPS Kota Metro	4.899.000	3.329.600	1.569.400	32,04%
Pemantauan Pelaksanaan Implementasi SPIDER pada BPS Provinsi Jawa Barat	3.412.000	3.332.000	80.000	2,34%
Pemantauan Pelaksanaan Implementasi SPIDER pada BPS Kota Tangerang Selatan	2.036.000	986.114	1.049.886	51,57%
Supervisi Pengelolaan Keuangan Persiapan Pemeriksaan Interim LK TA 2025 dengan Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang melalui Aplikasi SPIDER pada BPS Provinsi Jawa Barat	10.572.830	10.377.830	195.000	1,84%
Supervisi Pengelolaan Keuangan Persiapan Pemeriksaan Interim LK TA	1.285.000	893.000	392.000	30,51%

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Kegiatan	Nilai pada KAK (Rp)	Nilai Realisasi (Rp)	Efisiensi (Rp)	Persentase Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2025 dengan Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang melalui Aplikasi SPIDER pada BPS Kabupaten Bekasi				
Supervisi Pengelolaan Keuangan Persiapan Pemeriksaan Interim LK TA 2025 dengan Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang melalui Aplikasi SPIDER pada BPS Kabupaten Karawang	1.285.000	1.064.000	221.000	17,20%
Pendampingan Pembangunan Gedung Tahun 2025 pada BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara	9.294.600	8.742.070	552.530	5,94%
Kegiatan Pendampingan atas Pembangunan Gedung Kantor pada BPS Kabupaten Majalengka	430.000	430.000	0	0,00%
Pemantauan Tindak Lanjut Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara	19.260.000	17.411.500	1.848.500	9,60%
Pendampingan Uji Petik Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Penyediaan Data Statistik untuk Mendukung Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan pada BPS Provinsi Jawa Tengah	8.052.000	3.718.170	4.333.830	53,82%
Pendampingan Uji Petik Pemeriksaan Pendahuluan Kinerja atas Penyediaan Data Statistik untuk Mendukung Upaya Pemantapan Ketahanan Pangan pada BPS Provinsi Sulawesi Selatan	11.205.800	11.205.800	0	0,00%
Jumlah	79.296.730	65.503.984	13.792.746	17,39%

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Capaian kinerja Inspektorat Wilayah II pada tahun 2025 dengan indikator Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara mencapai 101,93%, yang berarti secara umum target kinerja telah terpenuhi bahkan melampaui target tahunan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan berjalan efektif dalam mendukung pencapaian sasaran organisasi, sesuai dengan persyaratan mutu yang ditetapkan. Namun demikian, pada level indikator penyusun, dari 3 (tiga) komponen indikator yang digunakan, masih terdapat 1 (satu) komponen indikator kinerja yang belum mencapai target, yaitu pada komponen nilai pengawasan konsultasi keuangan negara, hal ini menunjukkan perlunya penguatan pengawasan konsultasi keuangan dan pendampingan oleh auditor termasuk pemenuhan kewajiban pelaporan dan dokumen kendali mutu didalamnya.

Realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan target akhir Renstra 2025–2029, capaian pada 82,07%. Kondisi ini masih tergolong wajar mengingat tahun 2025 merupakan tahap awal periode Renstra, dan pada indikator kinerja ditargetkan meningkat secara bertahap pada tahun-tahun berikutnya.

4.2 Rekomendasi Perbaikan Kinerja

Terhadap kondisi pencapaian kinerja dengan memperhatikan analisis capaian kinerja beserta kendala yang dihadapi, Inspektorat Wilayah II perlu melakukan beberapa rekomendasi perbaikan sebagai berikut:

- a. Memperkuat kerkoordinasi dengan pihak terkait seperti Tim Pemantauan BPK atas pemantauan tindak lanjut yang telah

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

disampaikan, serta unit kerja kesestamaan dalam rangka reuiu laporan keuangan dan pendampingan pemeriksaan BPK;

- b. Penyelesaian laporan pengawasan sebagai tindak lanjut hasil pengawasan sebelumnya;
- c. Perbaikan SOP pengawasan dan peningkatan fungsi pada aplikasi Spider;
- d. Menyusun perencanaan pengawasan pengadaan barang jasa pada pengadaan yang dinilai berisiko tinggi.

LAMPIRAN

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 1. Pernyataan Perjanjian Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT WILAYAH II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eneng Lisnawati, SST., M.S.Ak.
Jabatan : Plt. Inspektur Wilayah II

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
Jabatan : Inspektur Utama

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Jakarta, 23 Oktober 2025
Pihak Pertama

Eneng Lisnawati, SST., M.S.Ak.
NIP. 19820204200412 2 001

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT WILAYAH II

No (1)	Sasaran (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara	71,58 Persen

	Program/Kegiatan		Anggaran
1)	4204 Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	Rp.	607.159.000
	Jumlah	Rp.	607.159.000

Inspektur Utama



Dr. Dadang Hardiwan, S.Si, M.Si
NIP. 19720609199412 1 001

Jakarta, 23 Oktober 2025
Plt. Inspektur Wilayah II



Eneng Lisnawati, SST., M.S.Ak.
NIP. 19820204200412 2 001

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 2. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Diploma III	2
2	Diploma IV/Strata 1	38
3	Strata 2	21

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 3. Jumlah Pegawai Menurut Golongan Kepangkatan Tahun 2025

No	Golongan Kepangkatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	II/c	1
2	II/d	1
3	III/a	32
4	III/b	5
5	III/c	4
6	III/d	10
7	IV/a	6
8	IV/c	2

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 4. Jumlah Pejabat Fungsional Unit Kerja Tahun 2025

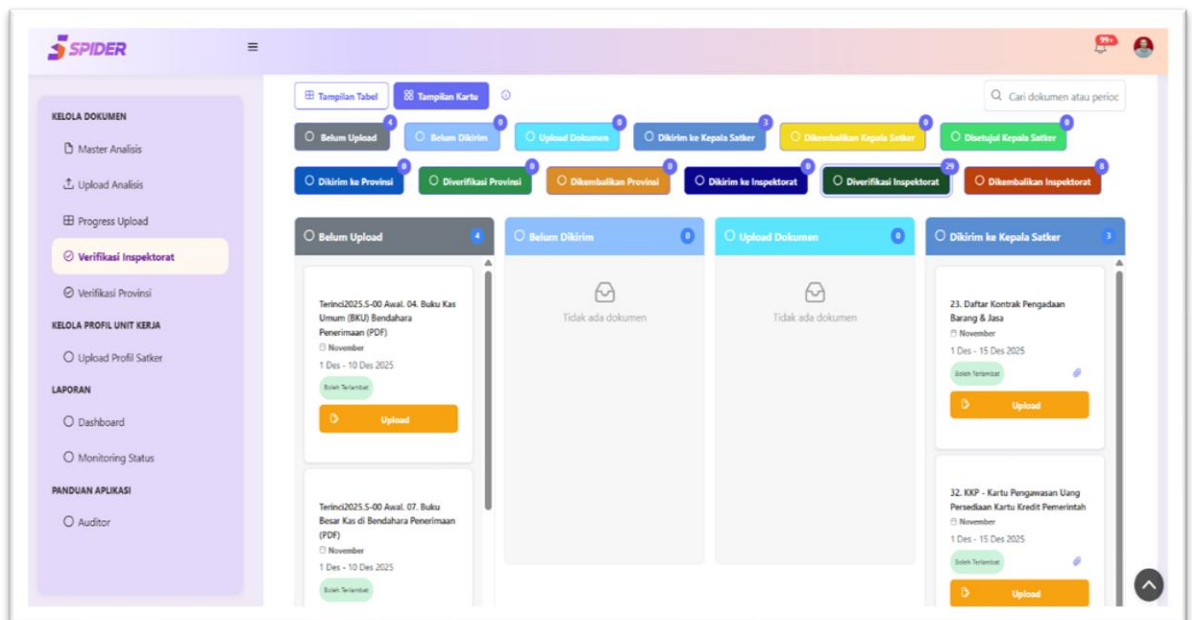
No	Jabatan	Jumlah
(1)	(2)	(3)
1	Auditor Madya	7
2	Auditor Muda	14
3	Auditor Pertama	7
4	Auditor Terampil	4
5	Fungsional Umum	28
6	Statistisi Muda	1

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 5. Prestasi dan Inovasi Tahun 2025



Gambar sertifikat penghargaan nilai pengelolaan arsip



Gambar web Spider online

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 6. Alokasi Anggaran Belanja dan Capaian Kinerja Tahun 2025

Uraian		Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sasaran Kegiatan	Peningkatan Kualitas Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara untuk Pencapaian Tujuan Organisasi	607.159.000	601.341.809	99,04			101,93
IKK	Nilai Pengawasan Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara				71,58	72,96	101,93
RO	Layanan Pengawasan Internal Inspektorat Wilayah II	607.159.000	601.341.809	99,04	34,00	34,00	100,00

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 7. Rincian nilai kinerja pengawasan assurances Tahun 2025

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	NILAI KINERJA				
		SOP	PEDOMAN	LAPORAN	KENDALI MUTU	KETEPATAN WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Reviu Revisi DIPA-1	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	
2	Reviu Revisi DIPA-2	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	
3	Reviu Revisi DIPA-3	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	0,0500
4	Reviu Revisi DIPA-4	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	0,0500
5	Reviu Revisi DIPA-5	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	0,0500
6	Reviu Revisi DIPA-6	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	0,0500
7	Reviu Pagu Indikatif	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,1000
8	Reviu Pagu Anggaran	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,1000
9	Reviu Pagu Alokasi Anggaran	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
10	Reviu Usulan RKBMN	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
11	Reviu Perubahan RKBMN (RKBMN-P)	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
12	Reviu BMN Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (TDOP) -1	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
13	Reviu BMN Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (TDOP) -2	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
14	Reviu BMN Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah (TDOP) -3 Reviu Penilaian Sewa Kantin Pegawai tanpa persetujuan	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
15	Reviu RKBMN-P Tahun 2025 Tahap 2	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
16	Reviu Revisi DIPA-7	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
17	Reviu BMN Lainnya -1 Reviu Dokumen Analisis Penghapusan ATB 2025	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
18	Reviu BMN Lainnya -2 Reviu Penghapusan KDP BPS Kab. Sitaro	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
19	Reviu PIPK-1 BIRO KEUANGAN	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
20	Reviu PIPK-2 BPS PROVINSI MALUKU	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
21	Reviu PIPK-3 BPS KABUPATEN MINAHASA SELATAN	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
22	Reviu PIPK-4 BPS PROVINSI JAMBI	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
23	Reviu PIPK-5 BPS KABUPATEN SUMEDANG	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
24	Reviu Laporan Keuangan Tahunan	0,2500	0,2500	2,0000	1,0000	
25	Reviu Laporan Keuangan Semester I	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,1000
26	Reviu Laporan Keuangan Triwulan III	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
27	Audit Kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset	0,2500	0,2500	2,0000	1,0000	
28	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 1 STIS	0,2000		0,8000	0,4000	0,1000
29	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 2 BANTEN	0,2000		0,8000	0,4000	0,1000
30	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 3 PUSDIKLAT	0,2000		0,8000	0,4000	0,1000

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	NILAI KINERJA				
		SOP	PEDOMAN	LAPORAN	KENDALI MUTU	KETEPATAN WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
31	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 4 BPS PROVINSI D.K.I JAKARTA	0,2000		0,8000	0,4000	0,1000
32	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 5 BPS PROVINSI JAWA BARAT	0,2000		0,8000	0,4000	0,1000
33	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 6 BPS PROVINSI JAWA TENGAH	0,2000		0,8000	0,4000	
34	Audit Ketataan atas Pengelolaan Keuangan dan Aset 7 BPS PROVINSI JAWA TIMUR	0,2000		0,8000	0,4000	
35	Reviu PAK Dukungan Manajemen	0,0500		0,2000	0,1000	
36	Reviu PAK PPIS	0,0500		0,2000	0,1000	
37	Audit Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi) BPS KOTA PEMATANG SIANTAR	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
38	Audit Pengadaan Barang/Jasa (pengadaan software) BPS PROVINSI KALIMANTAN SELATAN	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,1000
39	Probiy Audit Pengadaan Barang dan Jasa	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	0,0500
40	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -1 Pengadaan MPD Wisatawan Nusantara	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
41	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -2 Pengadaan Outbound/Traveler Nusantara	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
42	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -3 Identifikasi Perpanjangan Super Map	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
43	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -4 Pengadaan Konsultan Tenaga Ahli	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	
44	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -5 Pengadaan Survei Digital MSA	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
45	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -6 Pengadaan MPD Wisman	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
46	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -7 Pengadaan Jasa Alih Media Pustaka	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
47	Reviu Kerangka Acuan Kerja Pengadaan Barang dan Jasa -8 Pengadaan Software Visualisasi Data dan Publikasi 2025 BPS Prov. Jabar	0,0250	0,0250	0,2000	0,1000	0,0250
48	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 1	0,0500		0,2000	0,1000	0,0250

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

NO	AKTIVITAS PENGAWASAN	NILAI KINERJA				
		SOP	PEDOMAN	LAPORAN	KENDALI MUTU	KETEPATAN WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
49	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 2	0,0500		0,2000	0,1000	0,0250
50	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 3	0,0500		0,2000	0,1000	
51	Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa Triwulan 4	0,0500		0,2000	0,1000	0,0250
52	Pemantauan Kepatuhan Penerapan P3DN	0,0500		0,2000	0,1000	0,0250
53	Reviu Rekomendasi Sanksi Daftar Hitam Penyedia	0,0500		0,2000	0,1000	
54	Pemantauan Pengelolaan Keuangan Tahap I	0,1000	0,1000	0,8000	0,2000	
55	Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang Periode Januari dan Februari 2025 (37 Unit Kerja)	0,1000	0,1000	0,8000	0,3350	0,1000
56	Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang Periode Maret dan April 2025 (37 Unit Kerja)	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,0475
57	Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang Periode Mei, Juni, dan Juli 2025 (37 Unit Kerja)	0,1000	0,1000	0,8000	0,3350	0,0925
58	Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang Periode Agustus, September dan Oktober 2025 (37 Unit Kerja)	0,1000	0,1000	0,8000	0,3150	0,0950
59	Pemantauan Dokumen Keuangan dan Barang Periode November 2025 (37 Unit Kerja)	0,1000	0,1000	0,8000	0,3050	0,1000
	NILAI SUB TOTAL	4,6500	2,8500	30,0000	14,4900	1,9100
	NILAI TOTAL PENGAWASAN ASSURANS	53,9000				

Laporan Kinerja Inspektorat Wilayah II Tahun 2025

Lampiran 8. Rincian nilai kinerja pengawasan konsultansi Tahun 2025

No	AKTIVITAS PENGAWASAN	NILAI KINERJA				
		SOP	PEDOMAN	LAPORAN	KENDALI MUTU	KETEPATAN WAKTU
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa 1	0,0500	0,0500	0,4000	0,2000	
2	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa 2	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	
3	Pendampingan Pengadaan Barang/Jasa 3	0,1000	0,1000	0,8000	0,4000	0,1000
4	Pendampingan Pemeriksaan Terinci BPK atas Laporan Keuangan BPS RI TA 2024	0,2000		0,8000	0,2000	
5	Pendampingan Pemutakhiran Data Entitas	0,1000		0,4000	0,1000	0,0500
6	Pendampingan Pemeriksaan BPK Interim atas Laporan Keuangan BPS RI TA 2025	0,2000		0,8000	0,2000	0,1000
	NILAI SUB TOTAL	0,7500	0,2500	4,0000	1,5000	0,2500
	NILAI TOTAL PENGAWASAN KONSULTANSI	6,7500				